

Tapping Box Bagi Tempat Usaha

SALATIGA (KR) - Sebanyak 50 tempat usaha di Salatiga dipasang alat monitoring transaksi usaha perekam data (tapping box) pada wajib pajak. Langkah ini dilakukan untuk memonitoring pendapatan dari sektor pajak restoran. Pemasangan ini merupakan tahap kedua di Salatiga dan bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Salatiga. Penjabat (PJ) Walikota Salatiga Sinoeng N Rachmadi mengatakan, pemasangan tapping box atau perekam data ini menjadi acuan bagi wajib pajak untuk memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga. "Tapping box akan memberikan catatan dan akan dijadikan acuan bagi wajib pajak. Saya minta juga ada pantauan rutin untuk melihat alat ini dipasang atau tidak di setiap wajib pajak," tandas Sinoeng N Rachmadi, Selasa (2/8). Sinoeng menambahkan nantinya akan disiapkan reward untuk wajib pajak yang patuh. Pemasangan tapping box ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya sudah dipasang sebanyak 45 tapping box pada wajib pajak. Pemerintah Kota Salatiga bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Salatiga untuk menyediakan alat tersebut. Kota Salatiga juga sedang mengadakan Salatiga Great Sale 2022, sebagai upaya dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD Salatiga. Banyak orang luar daerah datang ke Salatiga. Pemasangan tapping box ini juga mendapat dukungan dari PHRI, hotel, restoran, tempat usaha, dan Bank Jateng yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi pengunjung yang datang ke Salatiga. (Sus)

Pedagang Asongan Borobudur Terima Solusi Ganjar



KR-Budiono

Ganjar Pranowo saat diskusi dengan pedagang sekitar Candi Borobudur.

SEMARANG (KR) - Secercah harapan muncul dibekas para pedagang Asongan Komoditas 14 (AK 14) Borobudur. Nasib mereka yang tidak bisa berjualan sejak pandemi dan direlokasi akibat penataan kawasan Candi Borobudur, mulai ada titik terang. Hal itu terjadi usai pertemuan dengan Gubernur Jateng Pranowo di ruang kerja Gubernur, Selasa (2/8). Semula, pertemuan juga dihadiri manajemen PT TWCB. Namun karena berlangsung lebih awal, Ganjar baru mendengar dari sisi pedagang asongan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Serikat Pekerja Wisata Borobudur Wito yang mewakili pedagang mengatakan merasakan ada diskriminasi dari manajemen PT TWC akibat penataan kawasan Candi Borobudur. Mereka yang biasanya berjualan di depan Museum Karmawibhanga dipindah dan berburai di kawasan parkir bus.

Setelah mendengarkan keluhan dari para pedagang di Borobudur, Gubernur Ganjar Pranowo kemudian menawarkan solusi, yaitu para pedagang asongan diberikan tempat sementara di tempat relokasi bagi pedagang kawasan Candi Borobudur yang saat ini sudah ada. Usulan alternatif tempat sementara itu disambut sukacita para pedagang asongan. Mereka setuju untuk tidak berjualan keliling atau asongan jika disediakan tempat yang jelas. Usulan ini dinilai Ganjar paling ideal mengingat lokasi yang disediakan saat ini pun bersifat sementara.

Wito mengatakan ada harapan baru yang diterima pedagang setelah pertemuannya dengan Ganjar. Wito berharap Ganjar bisa segera menyampaikan usulan tersebut kepada PT TWC. Wito menegaskan para pedagang asongan siap untuk mengikuti aturan jika usulan dari Ganjar tersebut terwujud. (Bdi/Tha)

Petani Tembakau dan Kopi Terima Bantuan Alsintan

BOYOLALI (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kembali menyalurkan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani tembakau dan kopi yang ada di Kota Susu. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Pertanian (DisperTan) Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan pada Rabu (03/08/2022) di halaman kantor setempat. "Ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani tembakau dan petani kopi," ungkap Kepala DisperTan Kabupaten Boyolali, Bambang Jiyanto.

Dalam kesempatan tersebut ada 12 unit kendaraan roda tiga yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Boyolali dengan nilai total Rp 385.800.000. kendaraan tersebut diberikan kepada petani penghasil tembakau di Desa Suroteleng, Samiran, dan Tlogolele di Kecamatan Selo; Desa Selondoko di Kecamatan Ampel; Desa Nepen di Kecamatan Teras; Desa Gedangan dan Wonodoyo di Kecamatan Cepogo. Adapula petani tembakau di Desa Kayen di Kecamatan Juwangi; Desa Kembang di Kecamatan Gladagsari; Desa Keposong di Kecamatan Tamansari, serta Desa Manjung di Kecamatan Sawit.

Selain itu, juga diberikan satu set alat pasca panen kopi senilai Rp 99.650.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun 2022 yang terdiri dari mesin pengupas kulit kopi basah (pulper) satu unit, mesin pengupas kulit kopi kering (huller) satu unit, mesin sangrai kopi (roaster) satu unit dan kendaraan roda tiga sebanyak satu unit. Bantuan tersebut diberikan kepada petani kopi di Desa Sampetan, Kecamatan Gladagsari yang tergabung dalam Kelompok Tani Rukun Sentosa yang telah menanam kopi di tanah seluas 6 hektare dengan potensi pengembangan 10 hektar yang produksi per tahun 4,2 ton kopi kupas kulit kering. "Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bisa mengangkat kopi di wilayah Sampetan karena potensinya juga banyak petani kopi disana," ujar Wakil Bupati (Wabup) Boyolali Wahyu Irawan. (R-3)

PENGUNDIAN SIMPEDES BRI WONOSOBO

Rohimah Raih Grand Prize Toyota Avanza

WONOSOBO (KR) - Pengundian Simpedes BRI Wonosobo Periode II 2021 menampilkan hadiah grand prize mobil Avanza E berhasil diraih Rohimah dari nasabah BRI Unit Kepil Kabupaten Wonosobo. Penyerahan hadiah kepada pemenang dilakukan secara simbolis oleh Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Wonosobo Indra Budi Samiadji kepada perwakilan nasabah di Allure Square Wonosobo, Kamis (4/8).

Dalam pengundian BRI Simpedes dilangsungkan virtual melalui Live Streaming Instagram @BRI.Wonosobo kali ini, juga dibagikan berbagai hadiah menarik dengan total hadiah mencapai Rp 639,9 juta. Selain hadiah Grand Prize I mobil Toyota Avanza E, juga diundi hadiah utama berupa

3 unit sepeda motor Yamaha Lexi dan 21 sepeda motor Honda Beat Sporty CBS, 5 Handphone Oppo Reno 4F, serta hadiah hiburan 22 televisi LED dan berbagai hadiah hiburan lainnya.

Pinca BRI Wonosobo Indra Budi Samiadji, mengungkapkan bahwa pihaknya bertekad untuk turut serta mengembangkan sektor perekonomian di Wonosobo. Seperti memberikan kredit kategori produktif maupun konsumtif bagi para pengusaha maupun masyarakat luas. Berdasarkan data pada posisi 31 Juli 2022, BRI Cabang Wonosobo mampu menghimpun dana masyarakat dari Tabungan Simpedes mencapai lebih dari Rp 857 miliar dengan jumlah rekening 482.126 nasabah. Untuk

penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp 330 miliar dengan jumlah debitur 8.788 orang. Sedangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Baru Rp 823 miliar dengan jumlah debitur 40.633 orang. Dengan demikian, Kredit Usaha Mikro yang telah disalurkan BRI Cabang Wonosobo sebesar Rp 1,153 triliun dengan jumlah debitur 49.421 orang.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lanjutnya, Cabang BRI Wonosobo juga telah memiliki sedikitnya 1 KCP, 19 kantor unit, 18 ATM, 23 CRM, serta Elektronik Data Capture (EDC) yang telah terpasang di merchant-merchant di Wonosobo guna memudahkan para nasabah dan mitra kerja untuk bertansaksi.

Selain itu, BRI juga telah ikut mensukseskan program pemerintah, antara lain penyaluran subsidi pupuk di Wonosobo dalam bentuk Kartu Tani yang berjumlah mencapai 88 ribu Kartu Tani. Kartu Tani terse-

but bisa digunakan di 77 Unit Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang telah dilengkapi dengan layanan EDC BRI. Termasuk membantu dalam pencairan dana PIP maupun Program Keluarga Harapan (PKH). (Art)



KR-Ariswanto

Pinca BRI Wonosobo (tengah) usai menyerahkan secara simbolis hadiah utama Simpedes Toyota Avanza E 1.3 S MT disaksikan notaris, Dinsos Jateng, dan Sat Intel Polres Wonosobo.

Tak Ada Anak Salah, Orangtua Jangan Egois

SALATIGA (KR) - Rektor IAIN Ponorogo, Dr Hj Evi Muafiah MAg. mengatakan tidak ada anak yang salah, orang tua jangan egois. Ungkapan ini dikatakannya saat menjadi narasumber Seminar Nasional Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, yang digelar Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Rabu (3/8).

"Jika kita menyaksikan ada yang salah dengan anak, jangan langsung marah. Cari tau terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, dan cobalah untuk melihat dari perspektif anak," kata Evi Muafiah.

Ketua Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat UIN Salatiga, Prof. Irfan Helmi LC, mengatakan UIN Salatiga siap bermitra dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan untuk dilakukan. Yang perlu diingat adalah anak selalu meniru apa yang kita kerjakan.

Sedangkan Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Yosefin Dian MSi mengatakan masyarakat sering menghakimi dan memberi label buruk pada korban kekerasan seksual.

Padahal anak sebagai korban kekerasan seksual sebenarnya tidak bisa menolak kejahatan yang dilakukannya.

"Korban kekerasan seksual biasanya mengira dirinya adalah

penyebab, sehingga mereka seringkali merasa takut untuk bercerita karena menganggap orang tua akan marah dan sedih jika mengetahui sang anak telah menjadi korban kekerasan seksual," katanya.

Sesuai seminar nasional, pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan Nota Kerja Sama antara UIN Salatiga, DWP Kota Salatiga, DWP Kemenag, dan DP3A-PPKB, serta Yayasan Pulih dalam rangka mengurangi tingkat kekerasan seksual di masyarakat, khususnya di Kota Salatiga. (Sus)

Diskominfo Klaten Dorong Kepatuhan Keterbukaan

KLATEN (KR) - Untuk mewujudkan badan publik informatif, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Klaten mendorong serius pemanfaatan website di masing-masing perangkat daerah.

Salah satu usaha yang ditempuh adalah melalui kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2022. Dari 26 kecamatan yang dinilai terdapat 6 badan publik yang tidak mengembalikan kuesioner Self Assessment Questionary (SAQ).

Sedangkan dari 24 badan dinas yang dinilai terdapat satu badan publik yang tidak mengembalikan SAQ.

Kepala Diskominfo Klaten Amin Mustofa saat ditemui (Selasa, 2/8/2022)

mengatakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2022 menjadi percepatan untuk membangun badan publik informatif di Kabupaten Klaten.

Pemeringkatan itu dilakukan kata Amin sebagai bentuk kepatuhan badan publik atas UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Badan publik atau perangkat daerah di Klaten harus naik kelas. Tidak boleh lagi pejabat publik itu mengabaikan tentang permohonan informasi. Salah satunya dengan melakukan tata kelola informasi yang baik," kata Amin.

Lebih lanjut Amin menjelaskan, instansi yang dipinginya telah menyiapkan daya dukung melalui

infrastruktur jaringan termasuk membangun website untuk masing-masing perangkat daerah. Maka tantangannya, kata Amin, adalah komitmen agar website itu dikelola dengan optimal.

"Kini semua perangkat daerah di Klaten sudah terfasilitasi internet. Website oleh Diskominfo juga sudah dibuatkan. Sumber daya manusia juga ada. Tinggal sekarang optimalisasi saja. Sebanyak 24 badan dinas yang dinilai setelah dicek tim teknis, websitenya sudah jalan. Untuk 26 kecamatan setelah dilakukan pengecekan, 3 instansi ditemukan websitenya belum optimal," tambahnya.

"SAQ sedang diverifikasi untuk melihat kesesuaian jawaban dengan

pertanyaan. Data yang wajib diunggah di website melalui SAQ seperti profil badan publik, informasi wajib disediakan dan disebarluaskan seperti informasi setiap saat, berkala dan serta merta. Jadi sekarang anggaran badan dinas bisa dilihat publik.

Media sosial juga dipantau apakah support keterbukaan informasi. Berita juga menjadi tolak ukur pengelolaan informasi. Bagi badan dinas dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik akan diberikan penghargaan," pungkasnya. (Sit)



KR-Sri Warsiti

Amin Mustofa

RSGM Unimus Lakukan Survei Akreditasi



KR-Sugeng Irianto

Suasana survei akreditasi.

SEMARANG (KR) - Guna mempersiapkan akreditasi terhadap Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), pihak RSGM Unimus menyelenggarakan acara survei simulasi akreditasi. Survei selama beberapa hari tersebut dilaksanakan di RSGM lantai 6 dan di sejumlah fasilitas yang ada di RSGM Unimus. Tim surveyor lembaga akreditasi rumah sakit Indonesia ini dipimpin drg Bagus Ario Wibowo SH MM CCCE dan Apt Endang Sulistyarningsih MKM dari LARSI (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia).

Survei dihadiri Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd dengan lengkap para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unimus beserta jajarannya, serta Direktur RSGM Unimus drg Dwi Windu Kinanti MMR beserta jajarannya termasuk Ketua Dewam Pengawas Dr Sri Rezeki, ketua tim akreditasi. Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd menyampaikan perlunya survey tersebut untuk mengukur "nilai" sebagai acuan untuk nantinya mengajukan akreditasi RSGM Unimus. Sehingga berbagai masukan dan saran saran dari tim survei sangat penting dan diperlukan Unimus dan RSGM Unimus. "Kami minta saran masukan untuk pengembangan RSGM yang mulai operasional sejak 2018/2019. Unimus juga sedang membangun RS umum dan 3 tower masing masing tower 9 lantai," ujar Rektor. (Sgi)

Mimbar Legislatif

Transformasi Digital Jadi Keharusan

SEKRETARIS Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirichadl mengatakan, pandemi Covid-19 diakui atau tidak telah mengubah pola pikir masyarakat terutama pelaku bisnis untuk melek digital. Dengan demikian transformasi digital menjadi sebuah keharusan supaya bisnis tetap jalan dan mendapatkan pangsa pasar.

Muhammad Ngainirichadl mengatakan hal ini saat menjadi narasumber dalam acara aspirasi Jateng, dengan tema "Usaha Ekonomi Kreatif di Era Digital" di Surakarta pekan lalu. Banyak masyarakat yang mengatakan mereka harus dipaksa untuk menguasai teknologi informasi. Pasar digital atau marketplace yang semula asing, sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang jamak untuk dilakukan.

Seperti pelaku usaha makanan di Wonosobo, sebelum pandemi omzetnya besar. Namun begitu pandemi datang mereka menjadi kelimpungan. Kondisi itu memaksa mereka untuk pindah ke pasar online. Ternyata saat ini online omzetnya justru lebih tinggi. Sekarang sudah saatnya pemerintah mendorong pengembangan ekonomi kreatif. DPRD juga telah mengesahkan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan kekayaan intelektual menjadi kreatif, sehingga menjadi nilai tambah. Sesuatu yang biasa saja menjadi barang yang memiliki nilai tambah.

Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan



KR-Budiono

Muhammad Ngainirichadl

an pembiayaan dan bahan baku.

Dari permasalahan itu masih dirumuskan lagi ada empat kategori. Pertama UKM tidak bisa produksi dan tidak bisa memasarkan. Kedua bisa produksi namun tidak bisa memasarkan. Ketiga bisa memasarkan tapi tidak bisa memproduksi. Keempat, bisa produksi dan memasarkan. Bagi yang tidak bisa memasarkan maka harus melek digital. Yang tidak bisa produksi kita carikan link UKM yang bisa produksi untuk membantu.

Dosen Fakultas Ekonomi Unisri Dr Suparno mengatakan, kata yang tepat adalah memaksa masyarakat khususnya pelaku bisnis untuk melek digital. Ada transformasi digital, harus ada literasi digital. Jika ingin main selamat ya harus segera beradaptasi dengan digital. (*)

(Disampaikan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Jateng Muhammad Ngainirichadl kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)